

**ANALISIS FRAMING ENTMAN PADA TEKS EDITORIAL “KABAR BURUK
SETELAH SOEHARTO JADI PAHLAWAN”: STUDI KASUS PADA MEDIA ONLINE
TEMPO.CO**

Hanina Afifah¹, Zahra Zaina Rusty²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara, 20155, Indonesia

Abstract. This study analyzes the framing of *Tempo*'s editorial entitled “Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan” published on November 12, 2025, which responds to the Indonesian government's decision to grant former president Soeharto the title of National Hero. The appointment sparked public controversy due to Soeharto's historical association with authoritarian rule and alleged gross human rights violations. This research aims to examine how *Tempo* constructs meaning and articulates its institutional stance through editorial framing. Employing a qualitative descriptive approach, the study uses Robert N. Entman's framing model, which consists of problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The findings reveal that *Tempo* frames the decision as a political and moral setback that threatens the spirit of reform and historical justice. The government is positioned as the primary actor responsible for selectively interpreting history while neglecting unresolved human rights abuses. Moral judgment emerges as the dominant framing element, emphasizing the suffering of victims and the ethical implications of state-sanctioned symbolic recognition. The editorial implicitly recommends maintaining critical historical memory and resisting the normalization of authoritarian figures. This study demonstrates that editorial framing functions as a strategic discursive tool through which media shape public interpretation, contest state narratives, and contribute to debates on political memory and human rights.

Keywords: Editorial, framing analysis, Political communication, *Tempo*, Robert N. Entman.

Abstrak Penelitian ini menganalisis pembingkaian editorial *Tempo* berjudul “Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan” yang terbit pada 12 November 2025 sebagai respons atas keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan tersebut memicu kontroversi publik karena berkaitan dengan rekam jejak kekuasaan otoriter dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana *Tempo* membangun makna dan menyatakan sikap institusionalnya melalui teks editorial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Robert N. Entman yang mencakup pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tempo* membingkai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sebagai kemunduran politik dan moral yang mengancam semangat reformasi serta keadilan sejarah. Pemerintah diposisikan sebagai aktor utama yang secara selektif menafsirkan sejarah dan mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Penilaian moral menjadi elemen framing yang paling dominan dengan menekankan penderitaan korban dan implikasi etis dari kebijakan negara. Editorial

secara implisit merekomendasikan pentingnya menjaga ingatan sejarah yang kritis dan menolak normalisasi figur otoriter melalui simbol kenegaraan. Penelitian ini menegaskan peran editorial media dalam membentuk wacana publik, politik memori, dan komunikasi politik di Indonesia.

Kata kunci: Editorial; Analisis *Framing*; Komunikasi Politik; Tempo; Robert N. Entman.

1. LATAR BELAKANG

Penunjukan Soeharto sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2025 memicu perdebatan di tengah masyarakat. Selain ditafsirkan sebagai penghormatan simbolis, pilihan negara tersebut juga ditafsirkan sebagai pernyataan politik yang secara langsung terkait dengan bagaimana negara menafsirkan sejarah, menilai figur kekuasaan, dan menempatkan masalah hak asasi manusia dalam agenda kebijakan saat ini (Agustin, 2025:1747). Sosok Soeharto masih memiliki masalah sejarah yang belum terselesaikan, terutama terkait dengan kejadian hak asasi manusia yang mengerikan yang terjadi selama pemerintahannya, sebagaimana terlihat dari penolakan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Tempo sebagai media nasional turut menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan tersebut melalui editorial yang berjudul “Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan.” Selain menyuarakan kekhawatiran normatif, editorial yang terbit pada 12 November 2025 ini berpendapat bahwa penunjukan Soeharto sebagai pahlawan dapat menghambat penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menghancurkan harapan para korban untuk mendapatkan keadilan. Gerakan reformasi Tempo menggambarkan pilihan presiden sebagai indikasi bahwa negara tidak lagi memprioritaskan isu hak asasi manusia dan sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perubahan.

Syas dan Rusadi (2021:31) menjelaskan bahwa editorial merupakan jenis wacana yang memiliki daya pengaruh tinggi karena merepresentasikan posisi institusional media terhadap isu publik. Alih-alih bersikap netral, media secara sengaja memilih sudut pandang, menekankan elemen-elemen tertentu, dan mengarahkan pembaca menuju pemahaman spesifik tentang realitas sosial lewat editorial. Dengan demikian, mengkaji editorial sangat penting untuk memahami bagaimana media menciptakan makna, terutama ketika menyangkut subjek yang sensitif seperti sejarah politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui analisis *framing* model Robert N. Entman dapat ditelusuri secara sistematis bagaimana media mengkarakterisasi isu, mengidentifikasi akar penyebabnya, memberikan penilaian moral, dan menyarankan solusi (Gunarso, 2023:48)

Penelitian terdahulu oleh Istiawan, dkk. (2025) persepsi masyarakat terhadap pelanggaran hukum humaniter sangat dipengaruhi oleh pembingkaian media. Menurut penelitian mereka, pembingkaian sensasional justru menyebabkan stigma

dan dukungan terhadap akuntabilitas hukum, tetapi pembingkaian yang menyoroti latar belakang sosial dan kemanusiaan dapat meningkatkan empati dan dukungan publik. Studi ini menyoroti pentingnya etika jurnalistik dalam melaporkan pelanggaran berat dan fungsi media dalam menumbuhkan kesadaran publik yang empatik dan berfokus pada keadilan.

Selanjutnya, hasil penelitian oleh Ahmad (2021) menunjukkan bagaimana media menggunakan pelanggaran hak asasi manusia historis sebagai landasan utama untuk menciptakan persepsi buruk terhadap seorang tokoh politik. Pembingkaian ini menjadikan identifikasi, pengalaman militer, dan dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia sebagai inti narasi media. Studi ini menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia sering digunakan sebagai senjata wacana politik, terutama ketika berkaitan dengan legitimasi jabatan publik dan kepentingan kekuasaan.

Meski demikian, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada *framing* dalam konteks pemberitaan umum dan liputan politik, bukan pada editorial yang berperan sebagai representasi sikap suatu media. Selain itu, kajian yang ada belum secara spesifik menyoroti *framing* media terhadap kebijakan simbolik negara berupa pemberian gelar kehormatan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat. Padahal, pemberian gelar pahlawan nasional merupakan bentuk legitimasi moral dan politik yang memiliki dampak jangka panjang terhadap sejarah, arah penegakan hukum, dan posisi korban dalam wacana publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menganalisis pembingkaian pada editorial Tempo dengan menggunakan empat unit analisis *framing* Entman. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap makna yang diciptakan oleh media tentang penyajian gelar pahlawan, masalah pelanggaran hak asasi manusia, dan arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada bidang komunikasi politik dan studi media, khususnya terkait dengan pembingkaian editorial, sejarah politik, dan masalah hak asasi manusia di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian penelitian ini didasarkan pada teks editorial. Melansir dari tempo.co (2024), teks editorial adalah jenis tulisan jurnalistik yang berisi pandangan, penilaian, dan sikap media tentang peristiwa, kebijakan, atau masalah yang dianggap penting bagi khalayak masyarakat. Tulisan ini disusun secara argumentatif dengan tujuan memengaruhi pembaca dengan menggunakan data, penalaran, dan penilaian normatif yang mencerminkan posisi redaksi. Editorial terbuka menyampaikan interpretasi dan pendapat institusional media tentang situasi sosial dan politik yang sedang berlangsung, berbeda dengan berita yang menekankan penyebaran fakta.

Media sekarang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam pembicaraan publik, mengkritik kebijakan, dan mengarahkan pembicaraan tentang masalah strategis.

Adapun untuk memahami seluk-beluk bagaimana media menyajikan realitas sosial melalui pilihan wacana, maka teori *framing* merupakan alat analisis yang tepat. *Framing* adalah teknik memilih dan menekankan bagian tertentu dari realitas untuk memengaruhi persepsi penonton tentang suatu peristiwa. Media secara aktif membangun dan merefleksi realitas melalui struktur bahasa, fokus masalah, dan penilaian normatif yang terkandung dalam teks (Wibisono, 2021:14). Peran *framing* semakin penting dalam editorial karena menunjukkan sikap institusional media terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Analisis utama penelitian ini didasarkan pada model *framing* Robert N. Entman. Menurut Entman, *framing* terdiri dari empat komponen utama: (1) *define problem* atau pendefinisian masalah, (2) *diagnose causes* atau penentuan penyebabnya, (3) *make moral judgement* atau penilaian moral, (4) *treatment recommendation* atau rekomendasi penanganan (Siregar & Qurniawati, 2022:8) Peneliti dapat menyelidiki bagaimana media tidak hanya menjelaskan peristiwa, tetapi juga mengarahkan pembaca pada siapa yang bertanggung jawab, nilai apa yang dipertaruhkan, dan sikap apa yang seharusnya diambil dengan lewat keempat elemen tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti digambarkan dan dijabarkan secara menyeluruh melalui pendekatan deskriptif. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk memaknai, menginterpretasikan, dan membandingkan data penelitian untuk memahami konstruksi makna yang dibangun dalam teks yang diteliti. Metode ini melibatkan peneliti sebagai alat penting yang secara aktif menafsirkan data sehingga proses analisis tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga memahami konteks dan makna (Waruwu, 2023:2898).

Teknik dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk melihat bagaimana media membungkai suatu peristiwa dan membangun realitas sosial melalui pilihan wacana tertentu. Adapun subjek penelitian ini adalah teks editorial *Tempo* yang berjudul *Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan* yang terbit pada 12 November 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Editorial *Tempo* berjudul “Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan” yang terbit pada 12 November 2025 secara tegas menyuarakan sikap penolakan terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada

10 November 2025. Editorial ini merepresentasikan pandangan institusional *Tempo* yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bermasalah, tidak hanya secara historis tetapi juga secara moral dan politik.

Isi editorial dibangun dengan menekankan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak hanya bermasalah secara simbolik, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan penegakan hak asasi manusia. *Tempo* menyoroti bahwa pemerintah dianggap menafsirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan secara parsial. Pemerintah hanya menekankan aspek jasa perjuangan kemerdekaan, sementara mengabaikan syarat utama lainnya, yakni berkelakuan baik serta berjasa bagi bangsa dan negara secara menyeluruh.

Editorial menguraikan rekam jejak Soeharto selama menjabat sebagai presiden yang dinilai sarat dengan kekerasan negara. Berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia diungkap secara rinci, mulai dari pembunuhan massa pasca peristiwa 1965, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, Rumoh Geudong, Peristiwa 27 Juli 1996, penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei 1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti. Penyebutan peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa editorial tidak sekadar menyampaikan opini, tetapi juga menyusun argumen berbasis fakta historis.

Tempo menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun proses hukumnya mandek di Kejaksaan Agung. Editorial menilai bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional berpotensi mengubur harapan korban untuk mendapat keadilan, sekaligus memberikan perlindungan politik terhadap upaya penuntutan hukum.

Editorial ditutup dengan kekhawatiran bahwa keputusan presiden tersebut mengirimkan pesan politik bahwa isu hak asasi manusia tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. Bagi korban pelanggaran HAM, keputusan ini dipersepsikan sebagai sinyal bahwa negara memilih melupakan masa lalu ketimbang menuntaskan secara adil.

Analisis Framing Model Robert N. Entman

Analisis framing terhadap editorial *Tempo* ini menggunakan model Robert N. Entman untuk mengungkap bagaimana media membingkai isu penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui empat elemen utama:

Pendefinisian Masalah (Define Problem)

Tempo secara jelas mendefinisikan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional sebagai masalah serius yang mengancam nilai reformasi dan keadilan sejarah. Masalah tersebut tidak dibingkai sebagai perbedaan tafsir hukum atau

perdebatan akademik semata, melainkan sebagai tindakan politik yang mencederai semangat reformasi dan melukai rasa keadilan publik.

Penggunaan frasa “pengkhianatan terbesar bagi reformasi” menunjukkan bahwa *Tempo* menempatkan kebijakan ini sebagai kemunduran demokrasi. Problem utama dibingkai bukan hanya untuk sosok Soeharto, tetapi keputusan negara yang dinilai mengabaikan sejarah kekerasan dan penderitaan korban. *Framing* ini mempersempit ruang pembacaan alternatif dan mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan tersebut sebagai tindakan yang keliru secara fundamental.

Tempo menempatkan isu ini dalam kerangka demokrasi pasca-reformasi. *Framing* masalah diarahkan pada pertanyaan normatif seperti apakah negara yang demokratis dapat memberikan penghargaan tertinggi kepada figur yang identik dengan kekuasaan otoriter? Dengan demikian, masalah yang dibingkai tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga perspektif, menyangkut arah nilai yang hendak dibangun negara ke depan.

Penentuan Penyebab (*Diagnose Causes*)

Tempo mengarahkan tanggung jawab utama kepada negara, khususnya pemerintah, sebagai aktor institusional yang memiliki otoritas dalam menetapkan gelar pahlawan nasional. Keputusan ini tidak dibingkai sebagai hasil tekanan publik semata, melainkan sebagai pilihan politik yang disengaja.

Editorial ini menggambarkan bahwa penyebab utama munculnya “kabar buruk” tersebut adalah kecenderungan negara untuk mengelola sejarah secara selektif. Dengan menyinggung pengabaian terhadap pelanggaran HAM dan proses hukum yang mandek, *Tempo* membingkai negara sebagai pihak yang berperan aktif dalam memproduksi narasi sejarah yang menormalisasi kekuasaan Orde Baru. *Framing* dalam hal ini menunjukkan bagaimana media menghubungkan masalah dengan struktur kekuasaan, bukan individu atau kebetulan sejarah.

Penentuan penyebab bersifat struktural ini juga mengindikasikan kritik *Tempo* terhadap politik memori. Negara tidak hanya diposisikan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga aktor yang menentukan versi sejarah mana yang dianggap sah dan layak diwariskan. *Framing* *Tempo* menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas, yakni kontrol negara atas memori publik.

Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*)

Penilaian moral merupakan elemen *framing* yang paling dominan dalam editorial ini. *Tempo* secara tegas menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Penilaian ini dibangun melalui bahasa normatif yang menekankan penderitaan korban dan kegagalan negara dalam menuntaskan kejahatan masa lalu.

Editorial menegaskan bahwa meskipun pahlawan nasional tidak harus sosok yang sepenuhnya tanpa cela, kesalahannya tidak boleh lebih besar daripada

kontribusinya. Dengan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan seolah meminta publik memaafkan seluruh kesalahan masa lalunya. *Tempo* membingkai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral negara.

Penilaian moral ini berfungsi sebagai strategi delegitimasi terhadap kebijakan negara. Media tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga menantang dasar moral yang melandasinya. Hal ini menunjukkan peran editorial sebagai arena artikulasi nilai, di mana media berupaya menetapkan standar etis dalam ruang publik.

Rekomendasi Penanganan (Treatment Recommendation)

Editorial *Tempo* tidak menyajikan rekomendasi kebijakan secara eksplisit dan teknoktaris, rekomendasi penanganan tetapi muncul dalam bentuk pesan normatif yang kuat. Editorial ini mendorong negara untuk meninjau ulang makna kepahlawanan dengan menempatkan keadilan sejarah dan hak asasi manusia sebagai prasyarat utama.

Tempo memperingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan berpotensi menghambat proses hukum dan melindungi pelaku dari pertanggungjawaban. Rekomendasi tersebut juga bersifat preventif, yakni mengingatkan publik untuk tidak menerima begitu saja upaya rehabilitasi tokoh Orde Baru. Kerangka Entman menjelaskan rekomendasi berfungsi mengarahkan sikap pembaca agar menolak normalisasi kekerasan negara melalui simbol kenegaraan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaian editorial *Tempo* berjudul “Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan” dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Tempo* secara konsisten membangun *framing* yang menolak penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dengan menekankan pada aspek moral, historis, dan politik dari kebijakan tersebut.

Pendefinisian masalah menjelaskan pembingkaian *Tempo* atas keputusan presiden sebagai ancaman terhadap semangat reformasi dan keadilan sejarah, bukan sekadar kebijakan simbolik negara. Penentuan penyebab diarahkan kepada negara sebagai aktor institusional yang secara aktif menyeleksi sejarah dan mengabaikan rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia. Evaluasi moral yang dilakukan dalam editorial menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai tindakan tidak etis karena berpotensi mengingkari penderitaan korban dan melemahkan tanggung jawab negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Rekomendasi penanganan disampaikan secara normatif dengan menegaskan pentingnya kejujuran sejarah dan sikap kritis publik terhadap upaya rehabilitasi figur otoriter melalui simbol kenegaraan.

Secara teoritis, temuan penelitian ini menegaskan relevansi model *framing* Entman dalam menganalisis editorial sebagai bentuk wacana opini media. Editorial tidak hanya mencerminkan sikap redaksi, tetapi berperan aktif dalam pembentukan makna, pembatasan moral, dan pengarahan interpretasi publik terhadap kebijakan negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* editorial memiliki peran strategis dalam politik memori, yakni mempertahankan ingatan kritis terhadap kejadian masa lalu dan mencegah normalisasi kekuasaan otoriter. Media dengan editorial tidak hanya menjadi ruang ekspresi opini tetapi juga perebutan makna dan legitimasi politik di ruang publik.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, Y. (2025). SOEHARTO: CONTROVERSY AND ELIGIBILITY AS A NATIONAL HERO: Soeharto: Kontroversi dan kelayakan sebagai Pahlawan Nasional. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 9(5), 1743-1748.
- Ahmad, D. (2021). Bingkai Sara Dalam Berita Politik: Analisis *Framing* Berita Pengangkatan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(1), 40-53.
- Gunarso, S. (2023). Analisis *Framing* Robert Entman Tentang Kasus Kejahatan Anak Di Bawah Umur. Jurnal Esensi Komunikasi Daruna, 47-53.
- Istiawan, I., Nugroho, Y., Susilo, T., Budi, I. K. S., & Iskandar, Y. (2025). Ketika Fakta Bertemu *Framing* : Tantangan dan Etika Media dalam Menyuarkan Pelanggaran Hukum Humaniter. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 5(1), 324-338.
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis *framing* pemberitaan buzzer di tempo. co. Journal of New Media and Communication, 1(1), 1-15.
- Syas, M., & Rusadi, U. (2021). Metafora sebagai kekuatan retorik dalam editorial media massa. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 25(1), 31-46.
- Tempo.co. (2025). Kabar Buruk Setelah Soeharto Jadi Pahlawan. Diakses dari <https://www.tempo.co/kolom/konsekuensi-buruk-soeharto-jadi-pahlawan-2088706>
- Tempo.co. (2024). Mengenal Teks Editorial: Ciri-ciri, Jenis, Struktur, dan Contohnya. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/mengenal-teks-editorial-ciri-ciri-jenis-struktur-dan-contohnya-1177462>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal pendidikan tambusai, 7(1), 2896-2910.
- Wibisono, I. (2021). *Analisis Framing dalam Berita Politik*. Banyumas: CV. Amerta Media.